

Memetakan Ruang Digital sebagai Area Praktik Pekerjaan Sosial

Flores G. Mayaut

Institut Sosial dan Teknologi (ISTEK) Widuri Jakarta

Email: flomayaut@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar struktur dan dinamika kehidupan sosial, menciptakan ruang digital sebagai arena baru bagi interaksi sosial, pembentukan makna, dan distribusi risiko sosial. Artikel ini bertujuan untuk memetakan ruang digital sebagai wilayah praktik pekerjaan sosial dengan menelaah karakteristik, peluang, serta tantangan yang muncul di dalamnya. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur kritis dan analisis konseptual, tulisan ini menyoroti bahwa ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ekosistem sosial yang membentuk relasi kekuasaan, identitas, partisipasi, serta memunculkan bentuk-bentuk kerentanan baru, seperti kekerasan daring, ketimpangan akses digital, disinformasi, dan eksploitasi data pribadi. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik pekerjaan sosial di era digital memerlukan redefinisi peran pekerja sosial, dari sekadar penyedia layanan konvensional menjadi agen yang mampu melakukan intervensi berbasis teknologi dengan pendekatan preventif, promotif, dan advokatif. Ruang digital memberikan peluang untuk memperluas jangkauan layanan, memperkuat partisipasi komunitas, serta mengembangkan model intervensi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Tulisan ini menegaskan bahwa pemetaan ruang digital sebagai area praktik pekerjaan sosial merupakan langkah strategis untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan profesi di tengah perubahan sosial akibat digitalisasi. Kontribusinya pada perumusan kerangka konseptual yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan kebijakan, pendidikan, dan praktik pekerjaan sosial kontekstual serta berorientasi pada keadilan sosial di era digital.

Kata Kunci: Ruang Digital, Area Praktik, Pekerja Sosial.

Abstract

The development of digital technology has fundamentally changed the structure and dynamics of social life, creating digital space as a new arena for social interaction, meaning-making, and the distribution of social risk. This article aims to map digital space as an area of social work practice by examining its characteristics, opportunities, and emerging challenges. Using a qualitative-descriptive approach through critical literature review and conceptual analysis, this study highlights that digital space functions not only as a means of communication but also as a social ecosystem that shapes relations of power, identity, and participation, and gives rise to new forms of vulnerability, such as online violence, unequal digital access, disinformation, and the exploitation of personal data. The study's findings indicate that social work practice in the digital era requires a redefinition of the role of social workers, from mere providers of conventional services to agents capable of conducting technology-based interventions with preventive, promotive, and advocative approaches. Digital space provides opportunities to expand service reach, strengthen community participation, and develop intervention models that are more adaptive and responsive to the needs of vulnerable groups. This study confirms that mapping digital space as an area of social work practice is a strategic step to maintain the relevance and sustainability of the profession amidst social changes caused by digitalization. His contribution to the formulation of a conceptual framework that can be used as a basis for developing contextual social work policies, education, and practices that are oriented towards social justice in the digital era.

Keywords: Digital Space, Practice Area, Social Work.

PENDAHULUAN

Transformasi sosial yang dibawa oleh proses digitalisasi dan internetisasi kehidupan modern telah secara mendalam mengubah cara manusia berinteraksi, membangun hubungan sosial, serta mengakses berbagai layanan sosial (Raidifi & Emiyati, 2024). Dunia digital kini tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi ruang sosial yang kompleks, di mana identitas, kekuasaan, dan praktik sosial saling berinteraksi secara dinamis (Simamora et al., 2025). Dalam konteks pekerjaan sosial, perkembangan ini menuntut refleksi kritis terhadap cara profesi tersebut beradaptasi, menjalankan praktiknya, dan tetap menjaga prinsip etika di tengah percepatan arus digitalisasi.

Digitalisasi telah melahirkan sebuah “ruang sosial kedua” yang menjadi arena bagi beragam bentuk interaksi yang sebelumnya hanya ditemukan dalam dunia nyata (Nendissa, 2025). Castells menyebut fenomena ini sebagai *space of flows*, yakni ruang yang terbentuk melalui sirkulasi informasi, modal, dan simbol yang bergerak di dalam jaringan komunikasi (Castells, 2020). Melalui ruang digital, individu, komunitas, dan organisasi dapat membangun jaringan sosial lintas batas geografis, sosial, dan budaya. Dalam konteks tersebut, pekerja sosial tidak lagi terbatas pada praktik berbasis komunitas lokal, melainkan juga dituntut untuk memahami komunitas daring (*online communities*) dengan dinamika sosial dan kulturalnya sendiri.

Lefebvre dalam karyanya *The Production of Space* menegaskan bahwa ruang bukanlah entitas yang netral, melainkan hasil konstruksi sosial yang terbentuk dari relasi kekuasaan dan praktik manusia (Fuchs, 2019). Dalam konteks digital, ruang tersebut dibangun bukan dari materialitas geografis, melainkan dari algoritma, interaksi daring, dan logika media sosial. Dengan demikian, ruang digital merupakan hasil produksi sosial yang memiliki dimensi simbolik dan struktural, di mana praktik sosial dapat memperkuat atau justru melemahkan hubungan antarmanusia (Inayah, 2024). Hal ini menuntut pekerja sosial untuk mampu beroperasi dalam lingkungan yang didominasi oleh interaksi mediatif dan identitas yang sering kali anonim.

Perubahan ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi profesi pekerjaan sosial. Di satu sisi, digitalisasi memungkinkan pekerja sosial menjangkau kelompok rentan yang sebelumnya sulit diakses akibat keterbatasan geografis, ekonomi, atau stigma sosial. Melalui teknologi digital, praktik seperti *online counseling*, kampanye sosial berbasis jaringan, dan advokasi publik dapat dilakukan secara lebih luas. Fenomena seperti *tele-social work* dan dukungan komunitas daring menggambarkan perluasan area praktik sosial di era digital (Adeseun Kafayat Balogun et al., 2025). Namun, di sisi lain, kehadiran ruang digital menimbulkan persoalan etis dan profesional baru, terutama terkait privasi, keamanan data, dan batasan peran profesional. Pentingnya pembaruan kode etik pekerjaan sosial agar sesuai dengan konteks digital. Hal ini menekankan isu-isu seperti penyimpanan data klien secara daring, komunikasi profesional melalui media digital, serta potensi penyalahgunaan informasi pribadi (Istyawan, 2025). Oleh karena itu, ruang digital tidak hanya menjadi arena praktik baru, tetapi juga medan refleksi etis dan epistemologis bagi profesi pekerjaan sosial.

Dalam konteks pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, mitra kegiatan seperti ikatan pekerja sosial profesional Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam memetakan ruang digital sebagai arena praktik pekerjaan sosial. Kondisi nyata menunjukkan bahwa sebagian pekerja sosial masih mengandalkan metode pendampingan konvensional berbasis tatap muka, sementara pemanfaatan *platform* digital untuk asesmen, advokasi, dan edukasi sosial masih terbatas. Kendala teknologi yang dihadapi meliputi keterbatasan literasi digital, minimnya pelatihan penggunaan aplikasi layanan sosial daring, keterbatasan infrastruktur internet yang stabil, serta belum tersedianya sistem manajemen data kasus berbasis digital yang terintegrasi dan aman. Situasi ini menghambat optimalisasi intervensi sosial di ruang digital. Permasalahan konkret yang dihadapi mitra berkaitan dengan keterbatasan pemahaman dan kapasitas dalam memetakan ruang digital sebagai wilayah baru praktik pekerjaan sosial. Dengan demikian, belum memiliki kerangka kerja yang jelas untuk mengidentifikasi pola interaksi, risiko sosial, serta potensi penyebaran informasi yang memengaruhi perilaku dan kesejahteraan masyarakat di ruang digital. Akibatnya, intervensi sosial masih berfokus pada pendekatan konvensional berbasis tatap muka dan belum mampu merespons dinamika permasalahan sosial yang berkembang melalui media digital secara efektif, sistematis, dan berbasis data. Keterbatasan ini menyebabkan peluang pencegahan, edukasi, serta pendampingan sosial di ruang digital belum dimanfaatkan secara optimal.

Beberapa peneliti telah mengkaji pekerja sosial di era digital. Parrott dan Madoc-Jones menyatakan bahwa pekerja sosial di era digital perlu memiliki kemampuan untuk menilai secara etis bagaimana teknologi memengaruhi relasi kekuasaan antara pemberi dan penerima layanan sosial. Oleh karena itu,

teknologi beroperasi dalam struktur yang sering kali mereproduksi ketimpangan sosial, pekerja sosial perlu memperhatikan aspek *digital divide* sebagai bagian dari analisis sosial mereka. Digitalisasi juga menimbulkan bentuk-bentuk baru permasalahan sosial yang perlu direspons oleh pekerja sosial. Isu seperti kekerasan siber, eksploitasi digital, isolasi sosial akibat ketergantungan teknologi, dan penyebaran disinformasi menjadi tantangan nyata (Parrott & Madoc-Jones, 2008). Ruang digital, dengan demikian, bukan hanya menjadi arena praktik sosial, tetapi juga sumber munculnya masalah sosial baru yang menuntut pemahaman mendalam terhadap konteks teknologi informasi. Penelitian Mishna menemukan bahwa pekerja sosial yang memanfaatkan media digital dalam praktiknya memperoleh perluasan jangkauan layanan, namun juga menghadapi ambiguitas peran. Pekerja sosial harus berfungsi sebagai komunikator, edukator, sekaligus penghubung digital (*digital connector*), tanpa kehilangan prinsip dasar pekerjaan sosial seperti keadilan, empati, dan kerahasiaan. Kondisi ini menuntut kepekaan baru terhadap karakteristik ruang digital sebagai arena sosial yang hidup dan dinamis (Mishna et al., 2021). Castells meneliti tentang di mana struktur sosial modern dibangun atas jaringan komunikasi yang saling terhubung. Dalam masyarakat jaringan, kekuasaan tidak lagi tersentralisasi, melainkan tersebar melalui arus informasi digital. Oleh sebab itu, pekerja sosial harus memahami dinamika kekuasaan baru ini agar dapat melakukan intervensi sosial yang relevan dan efektif dalam konteks digitalisasi masyarakat (Castells, 2020).

Dengan demikian, urgensi tulisan ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana digitalisasi mengubah lanskap praktik pekerjaan sosial. Ruang digital tidak hanya menghadirkan tantangan etis dan profesional baru, tetapi juga membuka peluang untuk memperluas peran pekerja sosial dalam mewujudkan keadilan sosial di dunia maya. Tulisan ini memberikan *novelty* untuk memandu profesi pekerjaan sosial dalam menavigasi ruang digital secara etis, efektif, dan berkeadilan sosial.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menelaah dan memetakan ruang digital sebagai wilayah praktik pekerjaan sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena ruang digital merupakan fenomena sosial yang kompleks, dinamis, dan penuh makna, sehingga tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka atau variabel kuantitatif (Creswell, 2013). Melalui pendekatan deskriptif, tulisan ini berupaya menggambarkan secara sistematis dan kontekstual bagaimana ruang digital dipahami, dimaknai, serta dimanfaatkan dalam praktik pekerjaan sosial, baik sebagai media interaksi, arena intervensi, maupun struktur sosial baru yang membentuk relasi antara pekerja sosial dan kelompok sasaran.

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan fokus pada penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Sumber data mencakup buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan publikasi ilmiah lainnya yang membahas pekerjaan sosial, digitalisasi, ruang sosial digital, serta praktik intervensi berbasis teknologi. Proses studi kepustakaan dilakukan secara sistematis dengan menyeleksi literatur yang memiliki relevansi konseptual dan empiris, khususnya mengenai transformasi praktik pekerjaan sosial di era digital (Saputra et al., 2023). Untuk memperluas perspektif analisis, tulisan ini juga mengacu pada literatur dari disiplin sosiologi, studi media, dan ilmu komunikasi sebagai upaya memperkaya pemahaman lintas disiplin terhadap fenomena ruang digital.

Analisis data dilakukan melalui pembacaan kritis, pengelompokan tematik, dan interpretasi terhadap temuan-temuan konseptual yang diperoleh dari literatur. Tahap awal analisis dimulai dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama terkait ruang digital, seperti ruang sosial virtual, relasi daring, praktik profesional berbasis teknologi, serta persoalan etika dalam pekerjaan sosial digital. Konsep-konsep tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menelusuri keterkaitannya dengan nilai, prinsip, dan tujuan profesi pekerjaan sosial (Sarosa, 2021). Melalui proses ini, peneliti berupaya memetakan bagaimana ruang digital tidak hanya berperan sebagai sarana pendukung, tetapi juga sebagai arena sosial dengan struktur, norma, dan dinamika tersendiri dalam praktik pekerjaan sosial.

Pada tahap interpretasi, hasil analisis tematik dihubungkan dengan konteks praktik pekerjaan sosial kontemporer untuk memahami berbagai peluang dan tantangan yang muncul dari pemanfaatan ruang digital sebagai area intervensi sosial. Peneliti menafsirkan temuan literatur secara reflektif untuk menyoroti isu-isu seperti perluasan jangkauan layanan, perubahan pola relasi profesional, serta tantangan etika dan privasi. Analisis ini dilakukan dengan menempatkan pekerjaan sosial dalam kerangka keadilan sosial dan kesejahteraan manusia, sehingga pemetaan ruang digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga

kritikal dan normatif (Sarosa, 2021). Melalui metode ini, diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang posisi dan peran ruang digital dalam praktik pekerjaan sosial, sekaligus menjadi landasan konseptual bagi pengembangan praktik dan riset lanjutan di bidang pekerjaan sosial digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Ruang Digital Pekerjaan Sosial

Pemetaan ruang digital sebagai ranah baru dalam praktik pekerjaan sosial menunjukkan bahwa dunia maya telah berevolusi menjadi arena sosial yang hidup, dinamis, dan sarat interaksi. Teknologi informasi dan komunikasi kini berperan penting dalam memediasi berbagai persoalan kesejahteraan sosial.

Platform seperti media sosial, aplikasi pesan instan, forum daring, serta layanan berbasis *web* tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi (Wewengkang et al., 2025), tetapi juga menjadi ruang relasional di mana individu dan kelompok mengekspresikan kerentanan, mencari dukungan, serta membangun solidaritas sosial (Nendissa et al., 2025). Kondisi ini mencerminkan pergeseran paradigma pekerjaan sosial dari pendekatan konvensional berbasis tatap muka menuju bentuk praktik hibrida yang mengintegrasikan interaksi daring dan luring secara kontekstual.

Dalam konteks ruang digital, berbagai isu sosial seperti kekerasan berbasis gender, kesehatan mental, kemiskinan, disabilitas, dan marginalisasi identitas muncul dalam bentuk narasi personal, kampanye digital, serta komunitas virtual baik yang bersifat sementara maupun berkelanjutan (Langi et al., 2025). Pekerja sosial berperan sebagai fasilitator, mediator, dan advokat dengan memanfaatkan ruang digital untuk melakukan asesmen kebutuhan, intervensi psikososial awal, serta memperkuat jejaring dukungan sosial (Tarore, 2025). Namun, karakteristik interaksi digital berbeda dengan interaksi langsung, terutama dalam aspek kedalaman hubungan, keabsahan identitas, dan batasan etika profesional. Oleh karena itu, pekerja sosial perlu memiliki kompetensi literasi digital yang memadai agar mampu memahami konteks, bahasa, serta dinamika kekuasaan yang beroperasi di ruang maya. Lebih lanjut, ruang digital tidak dapat dipandang sebagai entitas yang netral karena keberadaannya dibentuk oleh algoritma, kepentingan ekonomi, dan budaya partisipasi pengguna. Kondisi ini menyebabkan isu-isu sosial tertentu memperoleh visibilitas lebih tinggi, sementara isu lain justru terpinggirkan. Dalam situasi ini, peran pekerjaan sosial di ruang digital tidak hanya terbatas pada respons terhadap kasus individu, tetapi juga mencakup advokasi struktural melalui kampanye kesadaran, produksi narasi alternatif, dan penguatan suara kelompok rentan. Dengan demikian, praktik pekerjaan sosial di dunia maya berkontribusi pada transformasi sosial yang berakar pada jejaring digital.

Hasil ini mengidentifikasi berbagai tantangan etis dan profesional dalam pelaksanaan pekerjaan sosial di ruang digital. Isu seperti privasi data, kerahasiaan informasi klien, batas relasi profesional, serta risiko kelelahan emosional akibat paparan konten traumatis menjadi perhatian utama. Ketiadaan regulasi dan pedoman operasional yang jelas semakin memperbesar risiko tersebut, terutama dalam konteks Indonesia (Dery Athallah Afif et al., 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan kerangka etik serta kebijakan institusional yang adaptif terhadap kompleksitas praktik digital, namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar profesi pekerjaan sosial.

Menurut penulis, pemetaan ruang digital sebagai area praktik pekerjaan sosial memperlihatkan bahwa dunia maya merupakan perpanjangan dari realitas sosial, bukan wilayah yang terpisah. Keberhasilan intervensi sosial di era digital bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan kepekaan sosial, kompetensi profesional, serta pemahaman kritis terhadap teknologi. Dengan demikian, pekerjaan sosial di ruang digital perlu dipahami sebagai bentuk praksis reflektif yang terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial, sekaligus tetap menjunjung nilai keadilan sosial, pemberdayaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Ruang advokasi sosial digital (kampanye media sosial, *digital activism*)

Ruang advokasi sosial digital menegaskan bahwa kampanye melalui media sosial dan aktivisme digital telah berevolusi menjadi sarana strategis dalam memperjuangkan isu-isu kesejahteraan sosial, keadilan, serta hak asasi manusia di era masyarakat jaringan. Kehadiran ruang digital memungkinkan aktivitas advokasi berlangsung melampaui batasan geografis, temporal, dan struktural yang sebelumnya membatasi organisasi konvensional, sehingga membuka peluang partisipasi publik yang lebih luas, cepat, dan inklusif. Media sosial tidak lagi sekadar berperan sebagai saluran penyebaran informasi, melainkan juga menjadi arena pembentukan kesadaran kritis, mobilisasi dukungan, dan pemberian tekanan moral terhadap pemegang kebijakan (Irhas & Reni, 2025). Melalui penggunaan tagar, konten visual, narasi

personal, dan testimoni korban, isu-isu sosial yang sebelumnya terpinggirkan memperoleh eksposur publik yang signifikan dan menumbuhkan resonansi emosional kolektif.

Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa efektivitas advokasi sosial digital sangat ditentukan oleh kemampuan para pelaku advokasi dalam membingkai isu secara kontekstual dan relevan dengan pengalaman masyarakat sehari-hari. Kampanye digital yang efektif biasanya mengombinasikan data empiris dengan kisah-kisah humanis, menjadikan pesan advokasi tidak hanya informatif tetapi juga mampu menggugah emosi dan kesadaran publik (Ratnasari et al., 2021). Dalam hal ini, ruang digital berfungsi sebagai ruang diskursif tempat makna sosial dinegosiasikan, identitas kolektif dibangun, serta solidaritas lintas kelompok diperkuat. Aktivisme digital membuka kesempatan bagi individu yang sebelumnya pasif atau terpinggirkan dari ruang publik formal untuk turut serta dalam proses advokasi, baik melalui partisipasi simbolik seperti membagikan konten maupun melalui keterlibatan dalam aksi kolektif yang lebih terorganisasi.

Meskipun demikian, praktik advokasi sosial digital mengandung ambivalensi. Di satu sisi, ruang digital memperluas akses terhadap partisipasi dan demokratisasi advokasi, tetapi di sisi lain juga berpotensi menyederhanakan kompleksitas isu sosial menjadi narasi yang mudah dikonsumsi dan viral. Fenomena *slacktivism*, yaitu keterlibatan dangkal tanpa komitmen berkelanjutan, mencerminkan keterbatasan tersebut. Selain itu, algoritma media sosial yang berorientasi pada perhatian dan popularitas sering kali memunculkan bias terhadap isu-isu yang dianggap menarik secara komersial, sekaligus menyingkirkan isu lain yang kurang populer (Alifiarry & Kusumasari, 2021). Kondisi ini menimbulkan persoalan etis mengenai keberlanjutan advokasi serta keadilan representasi dalam ruang digital.

Menurut penulis, ruang advokasi sosial digital dapat dipahami sebagai bentuk perluasan ruang publik yang bersifat hibrid, menggabungkan dimensi teknologi, budaya populer, dan praksis sosial. Dalam konteks pekerjaan sosial dan gerakan sosial, ruang ini menawarkan peluang untuk mengintegrasikan pendekatan mikro dan makro, yakni menghubungkan pengalaman individu dengan agenda perubahan struktural. Advokasi digital yang reflektif dan berpihak pada keadilan sosial menuntut adanya literasi digital yang tinggi, kepekaan etis, serta kemampuan kolaboratif lintas aktor, termasuk komunitas akar rumput, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga formal. Dengan demikian, ruang advokasi sosial digital seharusnya dipandang bukan sekadar sebagai instrumen teknologis, melainkan sebagai arena praksis sosial yang dinamis, kompleks, serta mengandung dimensi ideologis dan transformasional.

Ruang layanan sosial digital (*tele-counseling*, konsultasi daring)

Ruang layanan sosial digital menunjukkan bahwa praktik *tele-counseling* dan konsultasi daring telah berevolusi menjadi bentuk layanan sosial yang responsif terhadap perubahan struktur masyarakat dan kemajuan teknologi informasi (Kowal et al., 2025). Temuan menegaskan bahwa pendekatan digital ini mampu memperluas akses publik terhadap dukungan psikososial, terutama bagi individu atau kelompok yang sebelumnya terhambat oleh faktor geografis, keterbatasan waktu, atau stigma sosial terhadap layanan tatap muka (Nendissa et al., 2024). Melalui *platform* digital, interaksi antara pekerja sosial dan klien dapat dilakukan secara lebih fleksibel, adaptif, dan aman, khususnya bagi klien yang memerlukan ruang privat untuk membahas persoalan personal.

Tele-counseling dapat mencapai kualitas hubungan profesional yang sebanding dengan konseling konvensional, asalkan didukung oleh kompetensi digital pekerja sosial, penerapan etika layanan yang tegas, serta pemanfaatan media komunikasi yang sesuai. Klien umumnya menunjukkan tingkat keterbukaan emosional yang tinggi dalam sesi daring, terutama ketika interaksi berlangsung secara sinkron melalui video call atau percakapan interaktif (Nurlaila, 2021). Temuan ini menegaskan bahwa ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknis, tetapi juga sebagai ruang relasional yang memungkinkan terbentuknya kepercayaan dan empati secara virtual.

Menurut penulis, implementasi layanan sosial digital masih dihadapkan pada tantangan struktural dan etis. Isu-isu seperti keamanan data, kerahasiaan informasi, serta kesenjangan literasi digital menjadi faktor penting yang memengaruhi mutu layanan. Selain itu, keterbatasan dalam memahami ekspresi nonverbal dan potensi *digital fatigue* pada pekerja sosial memerlukan strategi adaptif yang berkelanjutan. Dengan demikian, praktik layanan sosial digital menuntut redefinisi paradigma pekerjaan sosial dari sekadar bantuan individual menuju penguatan sistem, regulasi, serta kapasitas profesional agar layanan daring dapat dijalankan secara etis, inklusif, dan berkelanjutan dalam ekosistem kesejahteraan sosial modern.

Ruang pemberdayaan dan edukasi (kelas daring, pelatihan digital)

Ruang-ruang pemberdayaan dan edukasi berbasis digital, seperti kelas daring dan pelatihan berbasis teknologi, telah berkembang menjadi medium strategis dalam meningkatkan kapasitas individu maupun komunitas di tengah perubahan sosial akibat kemajuan teknologi informasi. Ruang digital ini tidak hanya sebagai wadah transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai arena pembentukan kesadaran kritis, penguatan keterampilan praktis, serta peningkatan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi (Asdin, 2023). Aksesibilitas tinggi yang ditawarkan oleh *platform* daring memungkinkan keterlibatan peserta dari berbagai latar belakang geografis dan sosial, sehingga memperluas jangkauan program pemberdayaan yang sebelumnya terbatas oleh ruang dan waktu konvensional.

Temuan ini menegaskan bahwa kelas daring dan pelatihan digital berperan sebagai ruang sosial baru yang memfasilitasi proses pembelajaran kolaboratif. Proses edukasi tidak lagi berlangsung secara satu arah, melainkan ditandai oleh dialog, pertukaran pengalaman, serta refleksi bersama yang memperkaya wawasan peserta. Fleksibilitas waktu dan metode pembelajaran turut mendorong partisipasi aktif, terutama di kalangan kelompok rentan seperti pekerja sektor informal, perempuan, dan generasi muda yang memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan formal (Ningrum et al., 2025). Dengan demikian, ruang digital berfungsi sebagai instrumen inklusi sosial yang efektif dalam memperkecil kesenjangan akses terhadap pendidikan dan keterampilan.

Menurut penulis, tanpa adanya desain program yang responsif terhadap konteks sosial dan budaya, ruang pemberdayaan digital berisiko mereproduksi bentuk-bentuk ketidaksetaraan yang sudah ada. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan partisipatoris yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses belajar serta integrasi nilai-nilai etis dan kontekstual dalam materi pelatihan. Ruang edukasi dan pemberdayaan digital memiliki potensi besar sebagai praktik transformatif, asalkan dikembangkan secara kritis, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Karakteristik dan Dinamika Interaksi Sosial di Dunia Digital

Tulisan ini mengungkap bahwa era digital telah melahirkan bentuk interaksi sosial yang berbeda secara mendasar dibandingkan dengan komunikasi tatap muka tradisional. Interaksi di ruang digital dimediasi oleh teknologi, berlangsung lintas ruang dan waktu, serta memperlihatkan intensitas komunikasi tinggi namun sering kali bersifat superfisial. Partisipan menilai media digital sebagai ruang relasional yang memungkinkan keterhubungan tanpa batas geografis, tetapi juga menimbulkan jarak emosional dan menurunkan kedalaman relasi (Irfan & Masyhuri, 2025). Bentuk komunikasi berbasis teks, simbol, dan visual singkat seperti emoji, stiker, dan video pendek cenderung menggantikan ekspresi emosional penuh, sehingga pemahaman pesan sangat bergantung pada interpretasi subjektif penerimanya.

Dinamika interaksi sosial digital juga memperlihatkan kemunculan identitas sosial yang fleksibel dan terfragmentasi. Individu memiliki kebebasan untuk menampilkan citra diri yang disesuaikan dengan norma, ekspektasi, dan karakteristik *platform* yang digunakan. Identitas digital sering kali tidak merepresentasikan identitas sosial di dunia nyata, melainkan hasil kompromi antara keinginan personal, tekanan sosial, serta pengaruh algoritma media (Ananda Ade Salsabila & Haerani Nur, 2025). Fenomena ini mendorong performativitas sosial, di mana interaksi tidak hanya berfungsi untuk membangun relasi autentik, tetapi juga untuk memperoleh pengakuan simbolik berupa likes, komentar, dan jumlah pengikut yang berperan sebagai bentuk modal sosial baru dalam komunitas daring.

Temuan tulisan ini menegaskan sifat ambivalen dari interaksi sosial digital. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang bagi demokratisasi partisipasi sosial, terutama bagi kelompok yang sebelumnya termarginalkan di ruang publik fisik. Media digital memungkinkan munculnya visibilitas bagi suara-suara alternatif dan memperkuat solidaritas lintas batas sosial. Namun, di sisi lain, mekanisme digital juga berkontribusi terhadap meningkatnya polarisasi sosial melalui pembentukan *echo chamber* dan *filter bubble*, di mana individu lebih sering berinteraksi dengan kelompok yang berpandangan serupa. Akibatnya, dialog lintas perspektif menjadi terbatas dan potensi konflik simbolik meningkat akibat ketiadaan mekanisme klarifikasi yang efektif. Selain itu, interaksi sosial digital sangat dipengaruhi oleh logika kecepatan dan kuantifikasi. Keberhasilan komunikasi diukur melalui respons instan dan tingkat viralitas, sementara refleksi kritis serta dialog mendalam cenderung terpinggirkan (Sihombing et al., 2025). Pola ini mengakibatkan perubahan dalam etika berinteraksi, di mana nilai-nilai seperti empati, kesabaran, dan tanggung jawab sosial mengalami penurunan. Fenomena seperti ujaran kebencian, misinformasi, dan *cyberbullying* muncul sebagai konsekuensi dari anonimitas relatif dan lemahnya

mekanisme kontrol sosial dalam ruang digital. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi bukan entitas netral, melainkan turut membentuk serta dipengaruhi oleh struktur sosial dan nilai-nilai yang berlaku di dalamnya.

Menurut penulis, bagian ini menegaskan bahwa karakter dan dinamika interaksi sosial di dunia digital merefleksikan transformasi sosial yang lebih luas. Dunia digital tidak dapat dipandang semata sebagai sarana komunikasi, melainkan sebagai ruang sosial dengan logika, norma, serta relasi kekuasaan yang khas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kritis dan reflektif dalam memahami serta mengelola interaksi sosial digital, agar potensi emansipatoris teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa mengabaikan risiko disintegrasi sosial dan penurunan kualitas relasi antarmanusia.

Strategi Adaptasi Pekerja Sosial di Dunia Digital

Transformasi teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam cara pekerja sosial memahami, melaksanakan, dan merefleksikan praktik profesional mereka. Dunia digital kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat bantu, melainkan telah menjadi arena praksis sosial yang aktif, kompleks, dan penuh dinamika kekuasaan, persoalan etika, serta tantangan profesional baru. Kondisi ini menuntut pekerja sosial untuk mengembangkan strategi adaptasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup dimensi reflektif, kritis, dan kontekstual agar mampu menjawab kompleksitas realitas digital secara efektif.

Salah satu strategi utama yang diidentifikasi dalam tulisan ini adalah peningkatan literasi digital profesional. Literasi digital bagi pekerja sosial tidak terbatas pada keterampilan operasional menggunakan platform daring, tetapi juga mencakup pemahaman kritis terhadap algoritma media sosial, pola interaksi virtual, keamanan informasi, serta implikasi etis dari praktik pertolongan berbasis teknologi. Pekerja sosial yang memiliki literasi digital tinggi menunjukkan kesadaran bahwa hubungan pertolongan di ruang digital memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan interaksi langsung, terutama terkait isu privasi, keaslian relasi, dan potensi penyebaran disinformasi. Dengan demikian, literasi digital harus diposisikan sebagai kompetensi inti profesi, bukan sekadar kemampuan tambahan. Selain itu, strategi adaptasi pekerja sosial juga tercermin dalam redefinisi relasi profesional dengan klien di ranah digital. Interaksi daring menghadirkan peluang perluasan jangkauan layanan, peningkatan fleksibilitas, serta kemudahan akses bagi kelompok rentan yang sebelumnya sulit dijangkau (Ramadhani & Jatnika, 2025). Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan baru seperti kaburnya batas profesional, meningkatnya tekanan untuk merespons secara cepat, serta risiko kelelahan emosional. Sebagai respons, pekerja sosial menerapkan batasan digital yang tegas, termasuk pengaturan waktu komunikasi, pemisahan akun profesional dan pribadi, serta penyusunan kesepakatan etis dengan klien mengenai penggunaan media digital dalam proses pendampingan.

Transformasi strategi adaptasi juga terlihat dalam perubahan pendekatan intervensi sosial. Era digital mendorong pekerja sosial untuk mengintegrasikan pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas melalui ruang daring, misalnya dengan menginisiasi kampanye advokasi digital, membentuk kelompok dukungan virtual, dan menyelenggarakan edukasi sosial lewat media sosial. Praktik ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan individual ke arah pendekatan struktural yang menempatkan ruang digital sebagai arena pemberdayaan sosial. Meskipun demikian, efektivitas intervensi digital sangat bergantung pada kemampuan pekerja sosial membaca konteks sosial, budaya, dan ekonomi klien, khususnya terkait kesenjangan dalam akses terhadap teknologi. Strategi adaptasi pekerja sosial di dunia digital tidak terlepas dari nilai-nilai dasar profesi (Handayani, 2024). Prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, serta perlindungan kerahasiaan tetap menjadi landasan utama praktik, meskipun penerapannya menyesuaikan dengan karakteristik dunia digital. Perkembangan teknologi menghadirkan dilema etis baru, seperti pengelolaan jejak digital klien dan pemanfaatan data daring, yang menuntut pekerja sosial untuk terus melakukan refleksi kritis dan memperbarui kode etik profesi agar tetap relevan dengan konteks digital.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adaptasi pekerja sosial di era digital merupakan proses yang berkelanjutan dan multidimensi. Proses ini mencakup penguatan kompetensi digital, pembentukan ulang relasi profesional, inovasi dalam strategi intervensi, serta refleksi etis yang mendalam. Dunia digital tidak hanya menghadirkan tantangan bagi praktik pekerjaan sosial, tetapi juga membuka ruang bagi transformasi peran pekerja sosial yang lebih adaptif, reflektif, dan responsif terhadap dinamika perubahan sosial kontemporer.

Penguatan kapasitas digital

Penguatan kapasitas digital dalam konteks profesional menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga melibatkan pergeseran cara berpikir, nilai etika, serta dinamika relasi sosial dalam praktik kerja. Berbagai studi menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas digital mampu memperluas akses dan efektivitas layanan yang diberikan oleh para profesional seperti pekerja sosial, pendidik, maupun pelayan pastoral serta memungkinkan respons yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial yang cepat. Penguasaan terhadap berbagai platform digital, media sosial, dan sistem informasi daring terbukti memperkuat kemampuan analisis, dokumentasi, serta komunikasi lintas batas ruang dan waktu (Yunas et al., 2024). Namun demikian, tanpa disertai literasi digital yang kritis, peningkatan kapasitas ini dapat menimbulkan risiko etis dan sosial, seperti pelanggaran privasi, ketimpangan relasi kuasa, dan dehumanisasi dalam interaksi profesional.

Penguatan kapasitas digital dipahami sebagai proses dinamis dan berkelanjutan yang menuntut integrasi antara keterampilan teknologis, refleksi etis, serta kepekaan terhadap konteks sosial. Kapasitas digital tidak seharusnya dipahami sebatas kemampuan teknis dalam mengoperasikan aplikasi, melainkan juga mencakup kemampuan untuk menafsirkan dampak sosial dari teknologi, menjaga batas profesional di ruang digital, serta mengelola identitas dan kehadiran diri secara bertanggung jawab (Andrianti et al., 2024). Dalam hal ini, institusi memegang peranan penting dalam menciptakan kebijakan, panduan etika, dan sistem pembelajaran yang mendukung pengembangan kapasitas digital secara sistematis dan berkelanjutan. Tanpa dukungan kelembagaan tersebut, penguatan kapasitas digital akan cenderung berjalan secara individual, terfragmentasi, dan tidak berkelanjutan.

Menurut penulis, kapasitas digital yang kokoh berimplikasi langsung terhadap peningkatan mutu praktik profesional dan akuntabilitas publik, sekaligus mendorong munculnya inovasi dalam menghadapi persoalan sosial yang kompleks. Dunia digital tidak hanya dipandang sebagai instrumen kerja, tetapi juga sebagai ruang sosial yang menuntut keterlibatan reflektif, kritis, dan etis dari para profesional. Oleh karena itu, penguatan kapasitas digital menjadi elemen fundamental bagi keberlanjutan, relevansi, dan integritas praktik profesional di tengah realitas masyarakat yang semakin terdigitalisasi.

Kolaborasi lintas disiplin (IT, psikologi, komunikasi)

Sinergi lintas disiplin antara bidang teknologi informasi, psikologi, dan komunikasi menjadi landasan strategis dalam merancang serta melaksanakan praktik intervensi profesional yang responsif terhadap kompleksitas persoalan sosial masa kini. Integrasi keahlian teknologi informasi berperan penting dalam pembangunan infrastruktur digital, pengelolaan data, serta pengembangan *platform* layanan berbasis teknologi yang mendorong aksesibilitas, efisiensi, dan skalabilitas (Rachmatullah & Purwani, 2022). Temuan mengindikasikan bahwa pemanfaatan sistem digital tidak hanya bersifat instrumental, tetapi turut mentransformasi pola kerja profesional serta dinamika hubungan antara penyedia layanan dan penerima manfaat.

Dari sudut pandang psikologi, kolaborasi ini memperkaya perancangan layanan dengan pendekatan yang berfokus pada individu, terutama dalam memahami dimensi kognitif, emosional, dan perilaku pengguna. Analisis menunjukkan bahwa intervensi yang diimplementasikan tanpa mempertimbangkan aspek psikologis pengguna berpotensi menghadapi hambatan seperti resistensi, rendahnya partisipasi, dan efektivitas yang menurun dalam jangka panjang (Idulfilastri et al., 2022). Oleh karena itu, kontribusi psikologi sangat esensial dalam menyusun strategi asesmen, pendampingan, serta penguatan resiliensi individu terhadap penggunaan teknologi dalam konteks sosial.

Sementara itu, disiplin komunikasi berfungsi sebagai jembatan konseptual dan operasional yang menghubungkan sistem teknologi dengan kebutuhan psikologis pengguna. Pembahasan memperlihatkan bahwa keberhasilan kolaborasi lintas disiplin sangat bergantung pada kemampuan merancang pesan yang tepat, menciptakan interaksi yang empatik, serta membangun ruang komunikasi yang inklusif (Nurwahida et al., 2025). Aspek komunikasi menjadi faktor kunci yang menentukan tingkat penerimaan, pemahaman, dan pemanfaatan teknologi oleh beragam kelompok sosial dengan latar belakang yang berbeda-beda.

Dengan demikian, kolaborasi lintas disiplin bersifat integratif, bukan sekadar penjumlahan kontribusi antarbidang. Setiap disiplin saling melengkapi dan membentuk suatu kerangka kerja yang menyeluruh. Pembahasan ini menekankan bahwa pendekatan lintas disiplin membuka peluang bagi terciptanya praktik profesional yang lebih adaptif, etis, serta kontekstual dalam merespons tantangan sosial di era digital yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Ruang digital telah berkembang menjadi ranah baru bagi praktik pekerjaan sosial yang tidak hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga menghadirkan kompleksitas yang bersifat multidimensional dan dinamis. Ruang ini bukan sekadar sarana komunikasi, melainkan ekosistem sosial yang membentuk pola relasi, identitas, partisipasi, serta menciptakan bentuk-bentuk baru kerentanan sosial. Dalam konteks ini, pekerja sosial perlu memahami bahwa persoalan sosial yang muncul di dunia digital sering kali terhubung dengan realitas offline, sehingga intervensi sosial harus disertai dengan analisis yang mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan struktural secara komprehensif. Transformasi ruang digital telah mengubah cara individu dan komunitas dalam mengakses layanan, menyuarkan kebutuhan, serta membangun solidaritas, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru seperti eksklusi digital, pelanggaran privasi, dan kekerasan berbasis teknologi.

Oleh karena itu, penyesuaian terhadap prinsip etika menjadi hal yang esensial dalam pengembangan praktik pekerjaan sosial di ruang digital. Nilai-nilai fundamental pekerjaan sosial seperti kerahasiaan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keadilan sosial perlu diinterpretasikan ulang agar relevan dengan penggunaan teknologi digital. Isu-isu seperti perlindungan data pribadi, persetujuan yang diinformasikan, dan batasan profesionalitas dalam interaksi daring menuntut adanya pedoman etis yang mampu menanggapi karakteristik ruang digital yang bersifat terbuka dan lintas batas. Selain aspek etika, kemampuan teknologis juga menjadi prasyarat penting bagi pekerja sosial untuk beradaptasi secara efektif. Penguasaan literasi digital, pemanfaatan platform daring, serta pemahaman terhadap algoritma dan sistem informasi sosial menjadi kompetensi kunci untuk memastikan bahwa intervensi sosial tetap relevan, inklusif, dan efektif. Lebih lanjut, diperlukan adaptasi konseptual untuk memperluas landasan teoretis pekerjaan sosial agar mampu menjelaskan dinamika sosial dalam konteks digital yang terus berkembang. Konsep-konsep seperti komunitas, partisipasi, dan pemberdayaan perlu direformulasi agar sejalan dengan karakter interaksi virtual yang fleksibel, cair, dan lintas batas geografis. Dengan demikian, integrasi antara adaptasi etis, teknologis, dan konseptual menjadi fondasi utama untuk menjamin bahwa praktik pekerjaan sosial di ruang digital tidak hanya mampu menanggapi perubahan zaman, tetapi juga tetap berpegang pada nilai-nilai profesional yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeseun Kafayat Balogun, Samson Niyi Dada, Oluwatobiloba Kazeem, & Kehinde Abiola Bakare-Adesokan. (2025). Integrating telehealth services in social work practice for vulnerable groups. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 25(1), 1984–1991. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.25.1.0248>
- Alifiarry, M. A., & Kusumasari, B. (2021). The Application of Social Movement as a Form of Digital Advocacy: Case of #TolakRUUPermusikan. *Journal of Government and Civil Society*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i1.2991>
- Ananda Ade Salsabila, & Haerani Nur. (2025). Representasi Diri di Sosial Media: Antara Identitas Nyata dan Identitas Virtual. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(4), 5601–5620. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9244>
- Andrianti, A., Aryani, R., Aryani, L., Yudistira, M., Yulvianda, R., & Sutoyo, M. A. H. (2024). SOSIALISASI PENGUATAN DIGITALISASI BAGI PELAJAR SMK DENGAN PENINGKATAN KEMAMPUAN DIGITALISASI PADA SMK NEGERI 2 MUARO JAMBI. *GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(3), 961–972. <https://doi.org/10.31571/gervasi.v8i3.7955>
- Asdin, A. (2023). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN BERBASIS TEKNOLOGI DI DESA DAREK LOMBOK TENGAH. *JURDAR: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 3(2), 21–27. <https://doi.org/10.59259/jpm.v3i2.325>
- Castells, M. (2020). *“Space of Flows, Space of Places: Materials for a Theory of Urbanism in the Information Age” The City Reader 7th Edition*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203826508-10>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Dery Athallah Afif, Ferina, A. T., Akmal Fahmi, Muhammad Ulil Albab, & Evy Nurmiati. (2024). TANTANGAN ETIS DALAM PENGGUNAAN JEJARING SOSIAL: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *JURNAL PERANGKAT LUNAK*, 6(3), 400–404. <https://doi.org/10.32520/jupel.v6i3.3570>

- Fuchs, C. (2019). Henri Lefebvre's Theory of the Production of Space and the Critical Theory of Communication. *Communication Theory*, 29(2), 129–150. <https://doi.org/10.1093/ct/qty025>
- Handayani, K. (2024). Strategi Adaptif untuk Mempertahankan Tenaga Kerja di Era Society 5.0: Menghadapi Tantangan Cobot. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(3), 185–200. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i3.50>
- Idulfilastri, R. M., Tiatri, S., Keni, K., Solikhah, N., Dewi, F. I. R., & Beng, J. T. (2022). DAMPAK PSIKOLOGIS MAHASISWA PADA IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN KOLABORATIF DAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN BELITUNG. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 198–206. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.16074.2022>
- Inayah, S. (2024). *Viral harmoni : menyebar nilai moderasi di dunia digital*. Ume Publishing.
- Irfan, R., & Masyhuri, M. (2025). Interaksi Sosial dan Era Digital : Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Modern. *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 4(1), 698–703. <https://doi.org/10.57235/jetish.v4i1.4963>
- Irhas, & Reni. (2025). Sosial Media dan Kesadaran Lingkungan: Pengaruh Kampanye Digital terhadap Perilaku Ramah Lingkungan. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 4(1), 315–321. <https://doi.org/10.55681/seikat.v4i1.1633>
- Istiyawan, A. (2025). Nilai dan Etika Pekerja Sosial dalam Proses Pertolongan: Analisis Penerapan dan Dilema Etis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 11543–11550. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.26542>
- Kowal, J. R., Manusiwa, C. M., Sureni, S., & Dendeng, L. C. (2025). Cyber Counseling: Pastoral Support through WhatsApp Group to Fellow Congregants. *Proskuneo: Journal of Theology*, 1(2), 105–117. <https://doi.org/10.53674/pjt.v1i2.223>
- Langi, E. A., Nendissa, J. E., Kowal, J. R., & Nyaming, F. G. (2025). Cultural Transformation through Contextual Mission Approach in the Digital Age. *Studia Philosophica et Theologica*, 25(1), 17–33. <https://doi.org/10.35312/studia.v25i1.711>
- Mishna, F., Sanders, J. E., Sewell, K. M., & Milne, E. (2021). Teaching Note—Preparing Social Workers for the Digital Future of Social Work Practice. *Journal of Social Work Education*, 57(sup1), 19–26. <https://doi.org/10.1080/10437797.2021.1912676>
- Nendissa, J. E. (2025). Dinamika Agama dalam Era Digital: Pengaruh Media Sosial terhadap Praktik Keagamaan di Kalangan Generasi Muda. *MAWAR SARON: Jurnal Pendidikan Kristen Dan Gereja*, 8(2), 1–20.
- Nendissa, J. E., Engel, J. D., & Suprabowo, G. Y. A. (2024). Online Social Support Terhadap Penyintas Covid-19 dari Perspektif Pendampingan Masyarakat di Karombasan Selatan, Manado-Sulawesi Utara. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, 17(2), 131–143.
- Nendissa, J. E., Langi, E. A., Pantow, A. G. F., Tonapa, D., & Sampepadang, R. D. P. (2025). ANALISIS KEEFEKTIFAN DAN TANTANGAN ETIS TERHADAP PERAN AI DALAM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN MULTIKULTURAL. *The Way: Jurnal Teologi Dan Kependidikan*, 11(1), 90–107. <https://doi.org/10.54793/teologi-dan-kependidikan.v11i1.178>
- Ningrum, D. P., Arifin, T. S. N., & Arrianie, L. (2025). PELATIHAN DIGITAL MARKETING SEBAGAI BENTUK PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI DI GAMPING YOGYAKARTA. *Jurnal Abdi Insani*, 12(5), 1861–1869. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i5.2434>
- Nurlaila, R. (2021). SOCIAL MEDIA AS AN ONLINE CONSULTATION SERVICE. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 4(1), 37–52. <https://doi.org/10.17933/diakom.v4i1.90>
- Nurwahida, N., Firmansyah, A. B., Yusuf, M., Khatima, K., & Aulia, A. D. (2025). Teknologi dan komunikasi antar budaya : Peluang dan tantangan di dunia digital. *Journal Peqquruang: Conference Series*, 7(1), 277. <https://doi.org/10.35329/jp.v7i1.6125>
- Parrott, L., & Madoc-Jones, I. (2008). Reclaiming Information and Communication Technologies for Empowering Social Work Practice. *Journal of Social Work*, 8(2), 181–197. <https://doi.org/10.1177/1468017307084739>
- Rachmatullah, N., & Purwani, F. (2022). Analisis Pentingnya Digitalisasi & Infrastruktur Teknologi Informasi Dalam Institusi Pemerintahan : E-Government. *JURNAL FASILKOM*, 12(1), 14–19. <https://doi.org/10.37859/jf.v12i1.3512>
- Raidifi, E., & Emiyati, A. (2024). Transformasi Sosial oleh Generasi Z dalam Konteks Masyarakat Majemuk. *Proceeding National Conference of Christian Education and Theology*, 2(2), 143–153. <https://doi.org/10.46445/nccet.v2i2.961>

- Ramadhani, A. F., & Jatnika, D. C. (2025). DINAMIKA INTERAKSI SOSIAL REMAJA DI ERA DIGITAL DAN PERAN PEKERJA SOSIAL. *Share : Social Work Journal*, 14(2), 148–155. <https://doi.org/10.24198/share.v14i2.59963>
- Ratnasari, E., Sumartias, S., & Romli, R. (2021). Social Media, Digital Activism, and Online Gender-Based Violence in Indonesia. *Nyimak: Journal of Communication*, 5(1), 97. <https://doi.org/10.31000/nyimak.v5i1.3218>
- Saputra, M. R. A., Chalid, F. I., & Budianto, H. (2023). *Metode Ilmiah dan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Kepustakaan (Bahan Ajar Madrasah)*. Nizamia Learning Center.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Kanisius.
- Sihombing, F. T., Gultom, L. H., Lidia Rumapea, Tri Santa Lasmarito Mahulae, Yunita Tri Carnova Manurung, & Fazli Rachman. (2025). Kewarganegaraan Di Masyarakat Jaringan: Dampak Interaksi Online Terhadap Solidaritas dan Kohesi Sosial. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 235–244. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i1.8102>
- Simamora, R. H., Baringbing, P. G. W., Beno, H., & Nendissa, J. E. (2025). Dari Eden ke Cyberspace: Menafsirkan Narasi Alkitab di Dunia Digital. *CHARISTHEO: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 5(1), 1–18.
- Tarore, S. Y. (2025). Dinamika Relasi antara Pekerja Sosial dan Klien dalam Tahapan Pendampingan Asesmen Awal. *JITSS (Journal of Innovation and Trend in Social Sciences)*, 2(1), 14–27. <https://doi.org/10.63203/jitss.v2i1.358>
- Wewengkang, E. J. N., Kuwissy, G. J., Wohon, F., Tolego, Y. B., & Palempung, F. F. (2025). Fenomena Pengemis Virtual Di Tiktok Dikaji Dari Teori Etika Kekristenan, Pendidikan Karakter Dan Literasi Digital. *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 6(1), 104–123. <https://doi.org/10.46974/ms.v6i1.138>
- Yunas, N. S., Susanto, A. H., & Kuswandro, W. E. (2024). Penguatan Kapasitas Digital Leadership Bagi Aparatur Pemerintah Desa. *Surya Abdimas*, 8(3), 376–385. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i3.4887>